

Berharap pada "Partai-partai Gerakan"?

Ihsan Ali-Fauzi

Dalam esainya untuk Nurcholish Madjid Memorial Lecture, "Demokrasi dan Disilusi", Goenawan Mohamad (GM) menunjukkan berbagai alasan mengapa demokrasi bisa, sudah, dan rasanya akan terus, mengecewakan banyak orang, termasuk mereka yang sepenuhnya mendukung sistem politik itu. Ini karena, kata GM, "demokrasi acapkali menghentikan proses politik dengan mendasarkan diri pada sebuah suara terbanyak atau sebuah konsensus. Dengan itu apa yang dianggap menyimpang, apa yang obscene, disingkirkan. Maka ia tampak sebagai sesuatu yang tak hendak membuka diri pada alternatif-alternatif baru." Di ujung esainya, GM menegaskan perlunya kita untuk terus mengontrol le politique, istilah Ranci re yang dipinjamnya untuk menyebut "proses mediasi antara kekuatan yang menjaga demokrasi sebagai format dan politik sebagai perjuangan ke arah kesetaraan".

Tulisan ini ingin mengajak GM dan para pembaca untuk mulai membicarakan kemungkinan tumbuhnya "partai-partai gerakan" di tanah air, untuk mendukung sisi "perjuangan" dalam kalimat GM terakhir di atas, tapi dalam jalur yang formal atau semi-formal. Seperti banyak sumber renungan GM, tulisan ini juga berangkat dari pengalaman Eropa—hanya saja kali ini lebih empiris dibanding umumnya sumber-sumber GM. Saya pertama-tama diinspirasi Herbert Kitschelt, ilmuwan politik kelahiran Eropa tapi belakangan banyak bekerja di Amerika, yang hampir 20 tahun lalu menulis *The Logics of Party Formation: Ecological Politics in Belgium and West Germany*.^[1] Dalam buku itu, Kitschelt mencoba menunjukkan bahwa perilaku partai-partai politik tidak harus sepenuhnya ditentukan oleh imperatif "kurva lonceng", seperti yang dikatakan GM dan umum disepakati para sarjana. Sesudah membaca tulisan ini, saya berharap bahwa kita bisa mulai bicara mengenai sebuah "partai perjuangan" di Indonesia di luar PDI-P!

Suara Pemilih bukan Segalanya

Dalam risetnya, Kitschelt pertama-tama tertarik dengan kenyataan tumbuh dan bertahannya apa yang ia sebut sebagai "partai-partai libertarian-kiri" di Eropa sejak 1960-an. Partai-partai itu pertama-tama muncul di Skandinavia, Prancis, dan Belanda di bawah label "Kiri Baru", dan bersaing dengan partai-partai komunis atau sosial demokrat. Lebih belakangan, di Austria, Belgia, dan Jerman (Barat), partai-partai "ekologi" atau "hijau" berhasil mengumpulkan suara cukup banyak dalam pemilu, yang makin mengukuhkan signifikansi partai-partai libertarian-kiri di atas.

Ini gejala baru, karena sebelum tahun 1960-an, sistem-sistem kepartaian dalam demokrasi Eropa distrukturkan menurut pola-pola social cleavages yang sudah lama ada dan stabil, seperti kelas, agama, etnisitas, atau hubungan pusat-daerah. Partai-partai lama di Eropa, seperti Partai Buruh atau Partai Konservatif, atau Partai Demokrasi Sosial, tumbuh di atas cleavages ini. Beda dari partai-partai ini, partai-partai libertarian-kiri di atas menawarkan program dan memperoleh dukungan dari konstituen yang serba melintasi (cut across) kantong-kantong sosial di atas.

Pertanyaan Kitschelt: jika hukum besi "kurva lonceng" begitu berperannya, bagaimana partai-partai libertarian kiri itu bisa bertahan dan tetap memperoleh

dukungan? Dengan memfokuskan perhatian pada orientasi dan perubahan nilai di kalangan generasi baru, yang lebih terdidik, para warganegara di era pasca-Perang di Eropa, Kitschelt menemukan bahwa partai-partai ini tumbuh dari gerakan-gerakan sosial yang peduli pada isu-isu gaya-hidup seperti lingkungan, rasisme, perdamaian dan gender; ringkasnya, kepedulian terhadap apa yang oleh Kitschelt disebut "politik ruang" dan "politik identitas".

Karena bentuk pengelolaan partai dan isu-isu substantif yang mereka perjuangkan, Kitschelt menyebut partai-partai itu sebagai "libertarian-kiri". Partai-partai itu "kiri" karena, "sejalan dengan tradisi sosialis, mereka menegaskan solidaritas dan kesamarataan dan menolak keutamaan pasar dan efisiensi alokasi sebagai arbiter paling pokok untuk menilai perkembangan dan keadilan sosial" (hal 2). Di sini ada dukungan kepada tradisi sosialisme yang tidak atau kurang percaya pada pasar, investasi swasta, dan ada komitmen kepada redistribusi untuk tujuan-tujuan egalitarian. Namun, pada saat yang sama, partai-partai itu "libertarian" dalam "penolakan mereka atas visi sosialis mengenai perencanaan terpusat dan organisasi partai, dan panggilan mereka kepada sebuah masyarakat di mana otonomi individual dan partisipasi warga dalam urusan-urusan publik memperoleh prioritas" (hal. 2). Untuk alasan ini mereka menolak otoritas birokrasi baik yang bersifat publik atau swasta untuk mengatur tindakan individual atau kolektif.

Sebagai konsekuensinya, Kitschelt menemukan bahwa partai-partai ini mencoba menemukan cara-cara baru di dalam memobilisasi warganegara, yang dapat menawarkan kepada warganegara ini sebuah bentuk masyarakat yang lebih terdesentralisasi dan partisipatif. Pada saat yang sama, partai-partai itu juga mencoba memperjuangkan sebuah masyarakat yang tidak terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi dan persaingan. Ia juga melihat bahwa, karena para anggota partai ini umumnya pernah terlibat di dalam gerakan-gerakan protes dan di dalam aliansi-aliansi longgar yang terbentuk di antara organisasi-organisasi egalitarian sebelumnya, di mana hanya ada sedikit hierarki di dalam proses pembuatan-kebijakan yang formal, maka para pemimpin partai ini juga membentuk dan menjalankan partai mereka dengan cara yang sama.

Bagi Kitschelt, pemahaman yang memadai atas partai-partai libertarian-kiri ini, yang membawa bentuk-bentuk dan cara-cara baru di dalam pengorganisasian dan strategi partai ke dalam demokrasi Barat, memerlukan cara analisis baru juga. Muncul dan bertahannya partai-partai itu tidak bisa dijelaskan menurut pandangan tentang organisasi partai yang "fungsionalis konvensional", yang selalu menafsirkan peran partai dalam kerangka imperatif-imperatif sistemik, entah itu stabilitas, adaptasi, keseimbangan, atau kemampuan politik. Alih-alih mengikuti penjelasan konvensional ini, Kitschelt mencoba menjelaskannya dalam konteks perubahan politik yang terjadi di Eropa, dalam bentuk realiansi elektoral dan dealiansi organisasional di antara warganegara dan partai.

Kitschelt lalu menawarkan dua logika pembentukan partai: yang konvensional, yakni "logika kompetisi di antara partai-partai", dan yang inovatif, yang disebutnya "logika representasi konstituensi" Bertentangan dengan logika pertama yang sudah lama dianut oleh partai-partai massa konvensional, kata Kitschelt, partai-partai libertarian-kiri dengan inovatif memanfaatkan "krisis representasi di banyak demokrasi modern" (hal. 5), dengan mengikuti logika pembentukan partai yang kedua. Bertentangan dengan cara konvensional di

dalam menjelaskan partai-partai politik, Kitschelt berpandangan bahwa partai-partai ini tidak sepenuhnya terhambat oleh persaingan elektoral seperti yang diduga banyak sarjana konvensional. Bagi partai-partai ini, suara pemilih itu penting, tapi yang juga tak kalah pentingnya adalah gagasan dan para aktivis yang menopang gagasan-gagasan ini—dan partai-partai baru dapat melahirkan inovasi politik di dalam demokrasi kontemporer.

Tapi mengapa terjadi krisis representasi di demokrasi-demokrasi Barat? Menurut Kitschelt, baik Belgia maupun Jerman (Barat) memiliki sistem representasi kelompok kepentingan dua lapis. Di lapisan pertama ada kelompok bisnis, buruh, profesi, dan gereja, yang "memperoleh akses khusus kepada wilayah pembuatan-kebijakan dan yang erat terkait dengan pihak eksekutif dan partai-partai mapan melalui komunikasi yang berlangsung reguler, posisi kepemimpinan yang saling bertaut, dan kaitan-kaitan organisasional". Sementara itu, lapisan kedua terdiri dari berbagai kelompok konsumen, perkumpulan perempuan, para aktivis lingkungan, dan kelompok kepentingan publik lainnya. Berbeda dari lapis yang pertama, kelompok terakhir ini hanya memperoleh sedikit kredibilitas di mata para politisi partai dan pejabat publik, karena "tingkat pengorganisasian mereka secara formal relatif rendah dan mereka tidak memiliki atau kekurangan elite yang dapat membuat komitmen-komitmen yang mengikat atas nama konstituen mereka" (hal 28). Lebih jauh lagi, mereka juga kurang diuntungkan oleh fakta bahwa mereka meng-crosscut kantong-kantong pemilih yang sudah direpresentasikan oleh partai-partai besar.

Dalam pandangan Kitschelt, partai-partai libertarian-kiri memperoleh suara terutama dari kelompok-kepentingan di lapisan kedua di atas, yang melihat bahwa partai-partai konvensional bukanlah saluran yang tepat untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Partai-partai itu bisa bertahan, tambah Kitschelt, karena mereka menerapkan teknik dan menyuarakan isu-isu yang menjadi kepedulian utama sekelompok kecil orang (tapi dengan jumlah yang terus meningkat), yang tidak akan mampu, atau mau, diadopsi oleh partai-partai besar. Di sini partai-partai massa yang mapan menjadi korban keberhasilan mereka sendiri, ketika mereka membuka diri seluas-luasnya untuk memaksimalkan perolehan suara. Dalam proses itu, pesan-pesan kampanye politik dan kebijakan mereka cenderung menjadi begitu melebar (menjadi partai catch-all), berorientasi status quo dan tidak mampu merespons tuntutan-tuntutan baru.

Implikasi: "Partai Gerakan" di Indonesia?

Pelajaran apa yang bisa diambil dari temuan Kitschelt di atas bagi penguatan demokrasi di Indonesia? Terutama dalam arah yang memenangkan sisi "perjuangan" GM dalam persaingannya dengan hukum besi "kurva lonceng" demokrasi?

Sudah klise, dan usang, mencerminkan kemalasan berpikir, untuk hanya mengatakan bahwa Indonesia beda dari Jerman (Barat) atau negara-negara Skandinavia. Tentu saja! Yang lebih penting adalah menelusuri sejauh mana dan bagaimana perbedaan itu, dan bagaimana mempersempit jaraknya. Bukankah sejarah yang terbaik untuk kita pelajari, dalam rangka memperkokoh dan menambah gizi demokrasi kita, adalah sejarah pertumbuhan demokrasi Eropa?

Dari segi ini saya ingin mencatat beberapa hal yang berguna dari temuan Kitschelt. Di penutup akan saya tunjukkan bahwa kita tak jauh-jauh amat dari Eropa.

Pertama, bermanfaat untuk menegaskan perbedaan yang dibuat Kitschelt antara "kelompok kepentingan" pada umumnya, yang lebih peduli pada kepentingan ekonomi, dengan apa yang ia sebut sebagai "kelompok kepentingan publik". Perbedaan ini membantu kita di dalam memisahkan secara lebih tegas antara apa yang umum disebut "kelompok-kelompok kepentingan" dan "organisasi-organisasi gerakan sosial". Dengan yang terakhir, yang biasanya dimaksudkan adalah organisasi atau aliansi longgar yang mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan warganegara dengan orientasi nilai dan perilaku yang oleh Kitschelt disebut "pasca-materialis". Khususnya oleh para sarjana Eropa, organisasi atau aliansi longgar inilah yang biasa disebut "gerakan-gerakan sosial baru". Nah, dalam sejarah Eropa, kedua jenis kelompok kepentingan itu ikut serta dengan partai-partai politik di dalam mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan warganegara. Namun, kedua kelompok kepentingan itu pada umumnya berbeda dari partai-partai politik karena yang terakhir ini ingin menduduki posisi-posisi pemerintahan lewat pemilu. Hanya dalam situasi-situasi khusus saja, seperti akan saya diskusikan di bawah, kelompok kepentingan publik mengubah diri mereka menjadi partai politik, seperti Partai Hijau di Eropa.

Kedua, dalam upayanya untuk menjelaskan hubungan antara partai politik, kelompok kepentingan, dan gerakan-gerakan sosial, Kitschelt menawarkan perspektif yang lebih komplementer, yang menekankan dinamika hubungan di antara ketiganya. Ia cenderung mendukung pandangan tentang representasi yang lebih reformis dan tidak antagonis: partai politik itu penting dalam demokrasi, tapi yang tak kalah pentingnya adalah kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisasi, yang bertugas mengawasi agar partai-partai politik setia kepada janji-janjinya selama kampanye, dan menawarkan model-model alternatif partisipasi warganegara.

Dalam skema Kitschelt, yang juga memainkan peran penting dalam demokrasi di Eropa adalah kelompok-kelompok kepentingan publik atau gerakan-gerakan sosial. Di sini, partai politik dan gerakan sosial memiliki peran berbeda, tapi bisa saling melengkapi. Dalam bukunya Kitschelt menggambarkan bahwa, misalnya, kadang warganegara di negara-negara tertentu di Eropa ingin agar kepentingan mereka bisa dibela lewat sistem demokrasi perwakilan atau langsung. Tapi di waktu lain mereka dibuat frustrasi oleh kedua sistem ini dan mulai tertarik dengan model partisipasi lewat gerakan-gerakan sosial. Atau, ketika kebutuhan material mereka sudah terpenuhi oleh sistem yang berpusat pada pasar dan individualis, tuntutan mereka beralih ke sumber-sumber kepedulian yang lain, seperti kepedulian akan lingkungan atau kesetaraan gender, dan mereka menjadi bersemangat untuk berpartisipasi di dalam proses pembuatan-kebijakan yang bisa berpengaruh di tingkat global. Tapi terlibat dalam organisasi-organisasi gerakan sosial juga bisa mendatangkan kekecewaan karena berbagai alasan: konsensus bersama sulit dicapai, banyak waktu luang harus dikorbankan, hasil akhir yang terbatas, dan lainnya.

Ketiga, oleh Kitschelt, partai-partai libertarian-kiri disebutnya juga dengan "partai non-partai" atau "partaipartai gerakan". Demikian, karena pada momen tertentu gerakan-gerakan sosial harus mentransformasikan diri mereka menjadi

partai-partai politik. Di Jerman (Barat) dan Belgia, partai-partai libertarian-kiri baru muncul karena tuntutan yang diajukan gerakan-gerakan protes "disepelekan oleh partai-partai sosialis, liberal dan demokrasi Kristen" (hal. 2). Karena corak spesifik tumbuh dan bertahannya partai-partai itu, kadang mereka juga memiliki "watak" yang khusus. Salah satunya adalah: kelonggaran organisasi mereka kadang menjadikan mereka, seperti ditunjukkan Gunther dan Diamond, "mitra koalisi yang tidak pragmatis dan tidak bisa diandalkan". [2]

Keempat, masih terkait dengan "watak" partai gerakan di Eropa, kesimpulan Kitschelt mengenai apa yang disebutnya "efek balik" yang sering terjadi ketika gerakan-gerakan sosial baru berubah menjadi partai-partai-politik. Salah satunya adalah kesulitan yang dihadapi partai-partai ini di dalam menjaga komitmen mereka pada demokrasi partisipatif. Karena partai-partai politik harus menghadapi masalah kelangkaan sumber, misalnya, Kitschelt menyebut sering munculnya klik-klik para "pengusaha politik" yang saling bersaing memperebutkan posisi penting dalam partai, yang mengecewakan para anggota. Kitschelt juga menyajikan banyak data yang menunjukkan bahwa kelonggaran organisasi kadang memunculkan masalah kekompakan, terbatasnya partisipasi, keabsahan keputusan kolektif yang diambil, dan pertanggungjawaban.

Butir-butir yang saya pertegas dari Kitschelt di atas bisa kita temukan jejaknya di Indonesia. Alhasil, kita memang berbeda dari Jerman (Barat) atau Swedia, tapi tidak berbeda amat. Bukankah kita pernah memiliki PRD, dan bukankah PKS adalah "partai gerakan" yang termakan oleh suksesnya sendiri dan kini ingin menjadi partai massa biasa dengan memuji-muji Pak Harto? Lalu, bukankah Walhi atau AKKBB sejenis kelompok kepentingan publik?

Daripada terus menggerutu kepada Megawati, mengapa kita tidak mulai membicarakan kemungkinan mendirikan "partai perjuangan" barn, yang bukan PDI-P? Dan kita terima manisnya—juga pahitnya sekalian?

Catatan:

[1] Herbert Kitschelt, *The Logics of Party Formation: Ecological Politics in Belgium and West Germany* (Ithaca: Cornell University Press, 1989). Catatan mengenai halaman yang saya buat di dalam teks merujuk ke buku ini. Untuk versi yang lain, yang lebih ringkas tapi dengan kasus empiris lebih banyak, lihat juga Herbert Kitschelt, "Left-Libertarian Parties: Explaining Innovation in Comparative Party Systems," *World Politics*, Vol. 40, No. 2 (January 1988), 194-234.

[2] Richard Gunther and Larry Diamond, "Species of Political Parties: A New Typology," *Party Politics* 9 (2003), hal. 189.